

**PELAKSANAAN PROGRAM PROYEK KERJA MASYARAKAT
(POKMAS) DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI
MANDAU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2012**

AL IKHLAS

dan

PEMBIMBING MUHAMMAD RIDWAN

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: iklas_al@yahoo.co.id

ABSTRACT

Along with be applied financial special Donation Program to POKMAS Village / sub-district at Regency Siak to insfrastruktur's development village / sub-district. insfrastruktur's development effort Village / this sub-district after make easy executed society by society bases Number Regent regulation 48 Year 2011 one be performed on each village / sub-district those are on Regency Siak. Base PERBUB that at Lubuk Jering's Village is performed Programs Society job Project (POKMAS) about development insfrastruktur year Village 2012. To the effect of observational it is subject to be know why Performing Program Society job Project (POKMAS) at Lubuk Jering's Village Year 2012 less maximal. Implementation concept that is utilized is concept that interposed by Edward III. which is implementation concept where exists four highlights which is communication, resource, executor attitude and bureaucracy structure. Tech that is utilized in data collecting utilizes interview and documentation tech.

After do research therefore writer can conclude that four big influential implementation highlights deep POKMAS'S performings Lubuk Jering's Villages years 2012. Of research result is concluded that was optimal Performing Process Programs since adverse coordination among village government with society so executed development was utterly entirely. Communication that is done was clear and consistent. Of proprietary resource facet was enough even there are some lack as reducing its field executor staff as tip of POKMAS'S performing spear this. Facility that gave by regency party no since POKMAS'S performing performed by modestly and self-supporting is society, Regency party just provide donation fund. Of cendrung's attitude facet not blocks since executors have the honour and have willingness.

Factor that constrain in performing Programs POKMAS slowing lents fund to get down from regency so program performing rather its finish long time, because of other fund that is used no so the execution enforced wait that regency

fund is downwards goes to village and other constraint which is in POKMAS'S performing which is if one of village at silvan troublesome district another one also following most constraint and development fund of slightly long time regency until it to executor that POKMAS'S performing rather its finish long time.

Key word : mobilization, consciousness, conflict, person is official, society.

Pendahuluan

Sejak digulirkannya program Kelompok Kerja Masyarakat (POKMAS) pada tahun 2006 di Kabupaten Siak, kini program tersebut terus meningkat dan telah berdiri 2.485 Pokmas. Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/kelurahan adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum serta fasilitas sosial dengan berdasarkan Peraturan Bupati No.48 Tahun 2011.

Berdasarkan tujuan dari tujuan penerapan program yaitu untuk mengurangi daerah terisolir dan mempermudah pemasaran disini dengan pembangunan jalan semenisasi menuju sawah dengan adanya pembangunan jalan tersebut mempermudah masyarakat menjual hasil panen, penciptaan lapangan pekerjaan dengan diadanya program ini yaitu seperti pembangunan POKMAS 2012 masyarakat yang menganggur mendapatkan pekerjaan sehingga sedikit mengurangi pengangguran dengan demikian pelaksanaan program ini melibatkan peran aktif masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dengan terlaksananya program ini masyarakat dapat memasarkan hasil panen dengan lebih mudah dan bagi masyarakat setempat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja dalam pelaksanaan program ini sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat didesa Lubuk Jering lebih meningkat, para pelaksana program ini lebih mengutamakan penduduk desa Lubuk jering yang menganggur dan pembelian bahan dalam pelaksanaan program ini lebih mengutamakan melakukan pembelian pada masyarakat yang menjual bahan walaupun hanya sedikit bahan yang tersedia ditoko masyarakat setempat apabila bahan yang diperlukan tidak ada ditoko masyarakat setempat baru dilakukan pembelian diluar daerah. Dengan dilaksanakan program POKMAS ini infrastruktur yang ada didesa Lubuk Jering menjadi lebih lengkap dengan lengkap fasilitas yang tersedia masyarakat jadi lebih mudah dalam kegiatan sehari-harinya misal dengan adanya pembangunan sumur bor masyarakat bisa memakai air bersih untuk mencuci dan sebagainya, selanjutnya dengan dilaksnakannya program ini masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja dalam pelaksanaan program ini dan meningkatkan taraf hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun pada kenyataan dilapangan program ini di desa lubuk jering masih belum sesuai harapan dan target yang telah ditetapkan. Fenomena yang terjadi yaitu pada RT 01 Desa Lubuk Jering yang memiliki sumur cincin dan penampungan air yang belum maksimal karena air sumurnya tidak bisa di gunakan sebab airnya kotor, seharusnya disini dibangun sumur bor namun pembangunan sumur bor justru dilakukan di RT 02 yang tidak terlalu membutuhkan dikarenakan sumber airnya telah bersih. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Lubuk Jering yang melaksanakan Program POKMAS Tahun 2012 dengan masyarakat setempat.
2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan POKMAS di Desa Lubuk Jering Tahun 2012.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu Mengapa pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012 belum optimal. Pertanyaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Mengapa pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Tahun 2012 berjalan kurang maksimal?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian adalah :

- Untuk mengetahui mengapa Pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Tahun 2012 kurang maksimal.

Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan teori-teori dalam ilmu pemerintahan, Terutama tentang pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) Kepada Masyarakat Desa Lubuk Jering.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif yaitu berupa studi kasus (*case study*) (Burhan Bungin, 2005 : 19-32).

Hasil dan Pembahasan

Dalam khazanah ilmu politik, implementasi dapat dikatakan sebagai suatu cara dari organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan baik itu melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan lainnya.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang mana arah-arrah kebijakan diterjemahkan menjadi aktivitas-aktivitas program karena program merupakan fakta yang sebenarnya sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya program-program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah dengan memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia.

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Konsep implementasi yang diterapkan sebagai kerangka analisis mengacu pada beberapa faktor bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang bekerja secara simultan tersebut yaitu empat faktor krusial berupa komunikasi, sumber daya, tingkah laku atau sikap/disposisi, dan struktur birokrasi.

Secara garis besar, pelaksanaan POKMAS ini dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur desa/kelurahan yang untuk memudahkan masyarakat dalam transportasi dan sebagainya.

Menurut konsep Edward III, sebagai upaya untuk menyusun analisis, penelitian ini mempertimbangkan hubungan serta interaksi empat faktor dalam implementasi kebijakan publik.

A. Pelaksanaan Program Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Pelaksanaan Program Proyek Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012 berlandaskan Peraturan Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Proram Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant) Tahun Anggaran 2012. Program ini bersifat Hibah (Specific Block Grant) kepada masyarakat yang telah di anggarkan dalam APBD Kabupaten Siak. Maksud Hibah Khusus Kepada POKMAS Desa Lubuk Jering adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan, rehabilitas dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilaksanakan oleh POKMAS, Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah untuk mempercepat pemerataan, menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial disetiap Desa/Kelurahan dengan ini Pemerintah Kabupaten Siak Mengalokasikan Dana Hibah Khusus Keuangan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta) untuk Desa Lubuk Jering.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan mengambil kebijakan tentang program proyek kerja masyarakat (POKMAS) yang merupakan salah satu bantuan keuangan yang diberikan langsung kepada masyarakat desa/kelurahan. Di dalam penerapannya Program ini harus mampu meningkatkan insfrastruktur pedesaan/kelurahan dan mengurangi daerah terisolir, selain itu program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam membangun desa/keluruhannya sendiri, karena teknis pelaksanaan yang di atur melalui peraturan bupati di jelaskan bahwa perencanaan pemabngunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diserahkan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan tujuan dari tujuan penerapan program yaitu untuk mengurangi daerah terisolir dan

mempermudah pemasaran disini dengan pembangunan jalan semenisasi menuju sawah dengan adanya pembangunan jalan tersebut mempermudah masyarakat menjual hasil panen, penciptaan lapangan pekerjaan dengan adanya program ini yaitu seperti pembangunan POKMAS 2012 masyarakat yang menganggur mendapatkan pekerjaan sehingga sedikit mengurangi pengangguran dengan demikian pelaksanaan program ini melibatkan peran aktif masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat, secara tidak langsung masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program ini dapat meningkatkan pendapatannya, dan program POKMAS merupakan pembangunan tiap-tiap desa sehingga pembangunan dapat terlaksana merata didesa Lubuk Jering walaupun tidak merata secara keseluruhan.

A.1 Persiapan

Persiapan kegiatan dalam suatu kegiatan merupakan salah satu hal penting agar proses pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tahap persiapan dalam kegiatan POKMAS di Desa Lubuk Jering adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Kelompok Masyarakat ditingkat Desa.
Untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator dan pelaksana monitoring, maka dalam pelaksanaan program ini dibentuk pula tim sebagai berikut :
 1. Tim Pembina Program Program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan di tingkat kabupaten yang di bentuk dengan keputusan Bupati
 2. Tim Pengendali Kecamatan di tingkat Kecamatan di bentuk dengan keputusan Camat
 3. Tim pengendali Desa yang di bentuk dengan keputusan Kepala Desa.
- b. Penyusunan Program dan pedoman pelaksanaan.
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di laksanakan dengan cara berikut :
 4. Persiapan kebijakan meliputi juga penentuan indicator keberhasilan
 5. Penetapan Kriteria-kriteria sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, yang terdiri dari criteria lokasi desa/kelurahan sasaran kriteria pemilihan prasarana dalam pelaksanaan fisik, kriteria pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat dan kriteria keberhasilan Program.
- c. Penetapan Lokasi dan Pagu Program.
 1. Alokasi di setiap Desa dibagi secara proposional sesuai dengan usulan dari Desa disetiap kecamatan, dengan memberikan prioritas pada Desa yang tertinggal Insfrastrukturnya.
 2. Hasil akhir Proses ini merupakan sasaran kegiatan per Desa/kelurahan.

A.2 Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi di tingkat Kabupaten dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten, sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang satuan kerja terkait, yaitu Tim pengendali Kecamatan dan Tim pengendali Desa/Kelurahan. Materi sosialisasi terdiri dari pedoman pelaksanaan dan dokumen penting lainnya.

Diseminasi yang merupakan sosialisasi dengan target terbatas secara intensif dan berjenjang, dilaksanakan oleh Tim pengendali kecamatan kepada

seluruh pelaku program dan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Program Proyek Kerja Masyarakat, serta dokumen lainnya agar PPK, POKMAS dapat menajalankan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pendampingan.

Pelaksanaan Program POMAS Tahun 2012, pada awal pembentukan Pelaksana Proram melibatkan semua masyarakat akan tetapi kurang transparansi para pelaksana hanya bekerja sendiri dan masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana untuk tiap-tiap program dan penentuan tempat untuk pelaksanaan program karena tidak adanya media komunikasi supaya masyarakat mengetahui Pelaksanaan Program ini, dan Pada akhir pelaksanaan program dikarenakan tidak menyampaikan hasil dari pelaksanaan Program, penyampaian melalui musyawarah yang tidak dihadiri oleh semua masyarakat dan tidak adanya media komunikasi untuk penyampaian hasil dari Pelaksanaan Program POKMAS ini.

A.3 Musyawarah Desa/Kelurahan

Musyawarah Desa/kelurahan dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat dan RW/RT, kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mensosialisasikan Program Hibah Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan.
2. Memilih dan menetapkan POKMAS sebagai pelaksana kegiatan di Desa/Kelurahan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan mengidentifikasi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat di Desa/Kelurahan tersebut.

Dalam kegiatan ini masyarakat diharapkan telah memperoleh pemahaman tentang posisi mereka pelaksana, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pemanfaat hasil kegiatan. Tim pengendali Kecamatan memaparkan kegiatan Program Hibah Keuangan kepada POKMAS permasalahan di Desa/Kelurahan, yang diikuti dengan penentuan POKMAS.

Persiapan Musyawarah Desa/Kelurahan adalah :

- a) Camat memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk mempersiapkan dan menetapkan jadwal Musyawarah Desa/Kelurahan.
- b) Kepala Desa/Lurah mempersiapkan tempat pertemuan dan peralatannya yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efektif.
- c) Mengundang Peserta Musyawarah Desa/Kelurahan.
- d) Desa/Kelurahan menyiapkan agenda pertemuan notulen pertemuan dan daftar hadir.

Proses yang dilakukan pada musyawarah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan tentang Program Hibah Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan oleh Camat atau Tim Pengendali Kecamatan dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- b) Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas oleh peserta.
- c) Penjelasan kriteria pengurus POKMAS Serta uraian tugasnya termasuk hak dan kewajibannya serta proses pemilihannya.
- d) Fasilitasi proses pemilihan POKMAS (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan tenaga Teknis serta nama POKMAS)

- e) Penjelasan dan kesepakatan mengenai pembuatan, lokasi pemasangan papan-papan informasi Program Hibah Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan yang ada beserta penanggung jawabnya.
- f) Pembuatan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.
Pada Musyawarah Desa/Kelurahan Desa ini Tim Pengendali Kecamatan dapat diwakili 2 orang anggotanya.

A.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Pelaksanaan kebijakan publik seperti pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa Lubuk Jering, keterlibatan aktor-aktor pemerintah tertentu sangat berpengaruh pada suatu instruksi atau keputusan selanjutnya yang akan menentukan para pelaksana kebijakan tersebut. Namun yang selalu dipertimbangkan yaitu apakah suatu kebijakan atau program yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan telah sesuai dengan kondisi para pelaksana yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan atau program tersebut. Disinilah akan terlihat dinamika yang muncul antara faktor-faktor yang terlibat sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil yang akan dicapai. Untuk memahami hal ini serta proses yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang berlangsung penulis mengamati dan membahasnya dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Edwards membicarakan empat faktor krusial yang mana keempat faktor ini bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada pihak pelaksana kebijakan didalam melaksanakan tugasnya sehingga mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi adalah faktor yang penting dalam organisasi karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang akan dilakukan. Menurut Edward. Tujuan komunikasi ini adalah agar para pelaksana dalam melaksanakan program-program POKMAS di Desa Lubuk Jering dapat memahami dan mematuhi instruksi atau perintah sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal. Masing-masing dalam pelaksanaan POKMAS di Desa Lubuk Jering dan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak atau Instansi lain seperti Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya serta Camat wilayah Pelaksanaan POKMAS seperti Camat Sungai Mandau serta masyarakat Desa Lubuk Jering sebagai pelaksana proyek-proyek pembangunan. Komunikasi tersebut berupa pertukaran informasi sesuai jenis pekerjaan, dengan tujuan efektifitas dan efisiensi. Pembahasan mengenai komunikasi berikut ini berkaitan tentang komunikasi dalam pelaksanaan POKMAS di Lubuk Jering dan penyampaian informasi serta dampak-dampak komunikasi yang tidak terjalin dengan lancar.

Berkaitan dengan transmisi, adalah faktor utama dalam komunikasi, karena sebelum kebijakan dilaksanakan, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk

melaksanakannya telah dikeluarkan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah Peraturan Bupati Siak Nomor : 48 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2012 bahwa para pelaksana telah mentransmisikan PERBUP tersebut dan hal ini terlihat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Siak dalam penentuan Tim Pembina dan Tim Pengendali Program POKMAS dan juga Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam penunjukan tim pelaksana Program POKMAS.

Berkaitan dengan kejelasan, dengan mengimplementasikan suatu kebijakan maka harus ada kejelasan dari tujuan kebijakan itu dibuat. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

Berkaitan dengan konsistensi, implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pelaksana harus konsisten, jelas dan tidak bertentangan dengan pelaksana kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Siak Nomor 48 Tahun 2011 tentang Program Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan, informasi serta perintah yang diberikan dan kebijakan lanjutan yang dibuat serta dilaksanakan bersumber dan berdasarkan PERBUP ini sehingga pelaksanaan POKMAS di Lubuk Jering tidak membingungkan para pelaksana dan para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber atau sumber daya adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi baik Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan kebijakan tidak hanya komitmen yang diperlukan akan tetapi dilihat kemampuan dan keterampilan pelaksana program dalam melaksanakan setiap tahapan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program seperti pada pelaksanaan POKMAS di Desa Lubuk Jering karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam proses implementasinya.

Dalam hal fasilitas dan dana implementasi, fasilitas juga merupakan sumber penting dalam implementasi POKMAS di Desa Lubuk Jering. Pada intinya, fasilitas ini merupakan barang atau mesin untuk mendukung operasional kerja dalam pelaksana POKMAS di Desa Lubuk Jering. Fasilitas yang diberikan oleh pihak kabupaten tidak ada karena pelaksanaan POKMAS dilaksanakan dengan cara sederhana dan swadaya masyarakat, disini peran pemerintah Desa sebagai pengawas pelaksanaan program apakah pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten

3. Sikap pelaksana/Disposisi

Disposisi menyangkut kesiapan dan kesediaan dari para pelaksana/ implementator dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan pelaksana tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah sikap-sikap serta kecendrungan-kecendrungan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan serta program-program POKMAS di Desa Lubuk Jering. Jika implementasi ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan POKMAS tersebut, tetapi juga para pelaksana harus memiliki sikap kemauan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan POKMAS ini, Jadi jelas sudah bahwa sikap dari para pelaksana mendukung serta siap dan memiliki kemauan kuat. Oleh karena tidak adanya sikap menghambat dalam implementasi yang berlangsung maka tidak dilakukannya pemberian insentif berupa penambahan keuntungan atau biaya tertentu untuk mempengaruhi sikap-sikap para pelaksanaan tersebut seperti yang disarankan Edward.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan dan program POKMAS di Desa Lubuk Jering. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan birokrasi dalam melakukan kebijakan. Terdapat dua hal utama dalam struktur birokrasi yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan terutama pelaksanaan program POKMAS di Desa Lubuk Jering yaitu SOP (*Standard Operating Procedures*). Dari pembahasan di atas maka dimaksudkan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) Desa/kelurahan adalah merupakan Program lintas sektoral dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, pelaksanaan Program Proyek Kerja Masyarakat (POKMAS) di Desa/Kelurahan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai dengan serah terima.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan bahwa :

1. Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada POKMAS Desa/Kelurahan adalah untuk mempercepat pemerataan, menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial disetiap Desa/Kelurahan dengan ini Pemerintah Kabupaten Siak Mengalokasikan Dana Hibah Khusus Keuangan sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta) untuk Desa Lubuk Jering..
2. Setelah dana turun dari kabupaten langsung dibentuk Tim Pengendali Tingkat Kecamatan (TP-PTK) Program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok masyarakat Desa/Kelurahan (Specific Block Grant) Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Camat Sungai Mandau Nomor : 33/KPTS/2012, TP-PTK bertugas

mensosialisasikan Program Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat, memantau perinsip-perinsip Program tersebut serta membantu penyelesaian masalah yang timbul.

3. Dari hasil musyawarah dibentuk dalam empat kelompok pelaksana yang melaksanakan Program hingga selesai dengan Programnya sebagai berikut : Pokmas satu pembangunan pagar MDA dan Pintu gerbang, Pokmas dua pembangunan MCK MDA dan sumur bor, Pokmas tiga pembuatan sumur dan penampung air, Pokmas empat pembangunan sumur dan penampungan air.
4. Pelaksanaan POKMAS 2012 tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, dimana masyarakat desa lubuk jering khususnya pada RT 01 memiliki dua buah sumur cincin dan penampungan air tetapi airnya kotor karena di sini merupakan dataran rendah dan masyarakat menggunakannya untuk mandi dan mencuci dan seharusnya di RT 01 ini dibangun sumur bor tetapi pembangunan justru dilakukan di RT 02 yang memiliki dua buah sumur bor yang berada pada dataran tinggi meskipun dibangun sumur cincin airnya tetap bersih, sehingga dirasa pembangunan ini tidak tepat sasaran. Penduduk setempat menggunakan air yang kurang bersih itu untuk mandi, mencuci dan sebagainya akan tetapi pemerintah desa tidak menanggapi keinginan masyarakat.
5. Kendala dalam pelaksanaan POKMAS yaitu kalau salah satu desa di kecamatan bermasalah desa yang lain juga ikut terkendala dan dana pembangunan dari kabupaten agak lama sampainya kepada pelaksana yang pelaksanaan POKMAS agak lama selesainya. Hambatan-hambatan lainnya dalam pelaksanaan ini biasanya dalam pembentukan POKMAS yang pertama yaitu masyarakatnya sedikit sehingga ketua pelaksana POKMAS tidak ada lagi karena rata-rata sudah pernah menjabat ketua dalam peraturannya ketua POKMAS tidak boleh menjadi ketua hingga dua kali.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberi masukan atau saran berupa :

1. Dalam keberhasilan pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan persiapan yang matang agar semua pihak dilibatkan baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan sebagai perencana.
2. Para pelaksana Program sebaiknya mengembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku Pelaksana tentang apa, mengapa, dan bagaimana setiap tahapan kegiatan dilakukan, melalui sosialisasi secara berjenjang agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan.
3. Sosialisasi harus dilakukan dengan jelas dan bertahap, agar masyarakat dapat menyusun perencanaan yang meliputi *identifikasi* permasalahan, penentuan usulan, *asistensi* dan *verifikasi*, finalisasi usulan, perencanaan teknis dan penyusunan anggaran.
4. Perencanaan seharusnya disusun dengan baik kemudian dilakukan pelaksanaan fisik yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat sehingga terwujud pengawasan yang *transparansi* dan *akuntabilitas* dalam pelaksanaan.

5. Pelaksana bagian penyaluran anggaran Pelaksanaan Program POKMAS agar lebih meningkatkan kinerjanya tentu dengan pengawasan Tim Pembina tingkat kabupaten lebih ditingkatkan lagi agar dana sampai ke tangan pelaksana lapangan tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abidin, Said Zainal (2006) *Kebijakan Publik*, Jakarta : Suara Bebas.
- _____ (2012) *Kebijakan Publik edisi ke-2*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Bungin, Burhan (2005) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan (2005) *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Grindle, Merilee S (1980) *Politics And Policy Implementation In The Third World*, USA : Princeton University Press.
- Gulo, W (2002) *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, Syarifudin (2002) *Metodelogi penelitian*, Bandung : Remaja Rosdakarsara.
- Hamidi (2004) *Metode penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press.
- Nogi, Hassel (2003) *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Balairung & CO.
- _____ (2004) *Kebijakan dan manajemen otonomi daerah*. Lukman Offset : Yogyakarta.
- Nugroho, Riant (2004) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Sugiyono (2009) *Metodelogi Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tangkilisan, Nogi Hesel (2003) *Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Balairung dan CO Yogyakarta.
- Winarno, Budi (2007) *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta : PT. Buku Kita.

Sumber lain :

- Peraturan Bupati Siak Nomor : 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Spesific Block Grant) Tahun Anggaran 2012.
- Keputusan Bupati Siak Nomor : /KPTS/DPPKAD/BH/2012 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Se-Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012.
- Keputusan Camat Sungai Mandau Nomor : 31/PMD/V/2012 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat(POKMAS) Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Spesific

Block Grant) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Keputusan Camat Sungai Mandau Nomor : 33/KTSP/2012 tentang Penetapan Tim Pengendali Program Tingkat Kecamatan (TP-PTK) Program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Spesifik Block Grant) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Keputusan Camat Sungai Mandau Nomor : 34/KTSP/2012 tentang Penetapan Petugas Pendamping Kecamatan (PPK) Program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (Spesifik Block Grant) Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2012.

Surat Perjanjian Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2012

Dokumen Hasil Musrenbang dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2012.

ANTARA, 13 Oktober 2010 (<http://www.antarariau.com/>).